

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, TNI merupakan idola bagi masyarakat, karena ia dianggap sebagai prajurit pejuang yang dalam kehidupan kesehariannya bahu membahu bersama rakyat, selain untuk menghadapi pihak-pihak luar yang berusaha menjajah kembali negeri ini, juga bersama masyarakat lainnya bekerja sama didalam mengatasi problem kemasyarakatan dan kenegaraan. Dalam benak TNI waktu itu hanya satu kata yang pasti "Kami adalah prajurit pejuang, tugas kami hanya satu, pertahankan dan tegakkan Negara proklamasi 17 Agustus 1945". Dilihat dari pemikiran diatas, maka TNI mempunyai sejarah yang sama tuanya dengan usia perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Lahir sebagai prajurit dengan *embrio* berbasiskan rakyat pejuang bersenjata yang bertekad menginginkan dirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap keprajuritan selanjutnya terbentuk, tumbuh dan berkembang secara mantap di dalam suasana kemanunggalan, bahu membahu bersama dalam perjuangan mempertahankan dan menegakan Negara Indonesia tercinta berdasarkan Pancasila dan UUD' 45 dan proklamasi 17 Agustus 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Perwira Siswa Seskoal TP. 1998/1999, *Implementasi Nilai-Nilai Kejuangan ABRI Dalam Memantapkan Stabilitas Nasional di Bidang Ekonomi Guna Mendukung Pembangunan Nasional di Era Reformasi* (Jakarta: Mabes TNI Angkatan Laut, 1999), hlm. 43.

Semasa perang kemerdekaan, militer atau TNI bersama-sama dengan rakyat berjuang dengan gigih merebut kemerdekaan dan mengisi proklamasi Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ketika tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi kolonial kedua dengan tujuan menghapus Republik Indonesia dan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, untuk kemudian digantikan dengan RIS ciptaan Belanda, maka pada tanggal 22 Desember 1948 Panglima Besar Sudirman menjawabnya dengan dekrit berlakunya pemerintah militer se-Jawa. Dan tanggal 19 Desember menjadi permulaan dari perang Gerilya Kedua. Oleh karena Panglima Besar Sudirman pada saat itu sakit berat, maka Panglima Komando Jawa, A.H. Nasution dikeluarkan maklumat berdirinya *pemerintahan militer* di seluruh pulau Jawa, beserta instruksi Bekerja no. 1 tentang pemerintahan militer dengan tugas-tugas operasionalnya, pada tanggal 22 Desember 1948.

Kemudian berlangsunglah aksi-aksi gerilya (perang gerilya kedua), *long march* guna membangun basis-basis pertahanan di lereng-lereng gunung, dan aksi-aksi *wingate* yaitu kembali ke daerah-daerah asal dari laskar-laskar perjuangan. Tentara Nasional Indonesia pada masa itu terdiri dari sukarelawan-sukarelawan tanpa dibayar, para pelajar (Tentara Republik Indonesia Pelajar/TRIP dan Tentara Pelajar/TP), mahasiswa, para santri dan ulama, kaum intelegensia, pegawai negeri, dan rakyat biasa. TNI pada waktu ini betul-betul merupakan *massa rakyat*, yaitu *gabungan kekuatan rakyat* yang berjuang tanpa pamrih kecuali merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Rakyat berjuang bukan karena disuruh dan dibayar

oleh pemerintah, akan tetapi berdasar ketulusikhlasan mengisi kemerdekaan yang terancam oleh agresi Belanda kedua.

TNI dimasa itu dimana didalamnya tergabung tentara pelajar dan laskar-laskar perjuangan itu bukan berupa tentara sewaan. Juga bukan merupakan tentara pemerintah dan alat pemerintah, tetapi betul-betul merupakan konglomerasi atau paduan kekuatan rakyat, atau kekuatan *Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta* yang semakin solid padat terpadu, dengan kesadaran tinggi dan sukarelawan yang murni. Mereka lahir dan hidup untuk berjuang, sedang pejuangannya adalah untuk Merdeka atau Mati, tanpa bisa ditawar tawar lagi.

Selanjutnya pada kurun waktu 1950-1958 ABRI (tokoh-tokoh militer pada umumnya bersikap *reserved*, tetap sederhana, tidak mau menuntut macam-macam hak *privilege*. Tidak pernah meminta imbalan jasa-jasa karena sudah ikut perang gerliya; *low profile*, berperan sebagai bayangkari Negara, dan selalu patuh pada pemerintah. Mereka menerapkan strategi Tut Wuri Handayani. Akan tetapi dengan adanya sistem multi-partai 1950-1959 yang membuat keadaan politik di Indonesia menjadi ricuh runyam dan kacau, maka TNI tidak lagi bisa tinggal diam dan bersikap Tut Wuri Handayani saja. Juga Presiden Soekarno menyadari hal ini. Maka pada 5 Juli 1959 diumumkan Dekrit Presiden Soekarno yang menyatakan: Kita kembali kepada penerapan UUD 1945 secara murni dan konsekuen; lalu dilakukan penataan kembali sistem politik yang sudah ada.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*, (Bandung: Maju Mundur, 1996), hlm. 4.

Peranan Militer/ABRI sebagai satu *Notwendigkeit* adalah sangat perlu di masa krisis, disebabkan oleh sangat lemahnya instuisi politik dan kacaunya kondisi politik. Tokoh-tokoh militer yang ditempatkan di lembaga-lembaga politik, sipil, dan legislatif hanya untuk mengisi vakum yang disebabkan oleh kekurang-mampuan orang-orang sipil dalam menjalankan fungsinya, dan gawatnya situasi yang memerlukan perlakuan *security*. Maka peranan militer dibidang sosial, pemerintahan dan politik di masa awal pembangunan itu sifatnya betul-betul puritan atau murni bersih. Mereka membenci korupsi, kepasifan, inkompetensi kaum sipil dan lemahnya birokrasi. Di kalangan militer sendiri dikembangkan program-program pengembangan dan pembaharuan pendidikan serta latihan (baik di luar negeri maupun di tanah air). Professional korps perwira ABRI menstimulir tanggung jawab dan kepedulian sosial yang lebih besar terhadap usaha-usaha modernisasi dan reformasi, perluasan perlembagaan politik, dan pelurusan pembangunan nasional.

Partisipasi militer atau ABRI di bidang sosial, ekonomi dan politik ini bersifat individu maupun berupa junta-junta kolektif (*juncta* = dewan, majelis, kliek). Maka keterlibatan militer dalam politik ini pada umumnya merupakan reaksi dari dua situasi masyarakat saat itu, yakni :

1. Meningkatnya konflik-konflik antar-partai dan antar kelompok sosial; dan
2. Melemahnya efektivitas serta legitimasi institusi-institusi politik yang tidak otonom, tidak berwibawa dan mudah di beli, dan kurang mampu melaksanakan fungsinya di masyarakat.

Oleh karena itu misi Dwifungsi TNI/ABRI pada awal masa modernisasi adalah :

1. Membangun pasukan Tentara (darat, laut udara dan kepolisian) yang tersentralir dan nasional, yang loyal pada bangsa atau rakyat dan Negara.
2. Ikut membangun birokrasi dan lembaga politik yang bersih dan efektif.
3. Peranan Kebayangkarian atau *guardian* dari militer atau TNI di awal masa modernisasi ini cukup rasional; juga pada masa-masa pembangunan PJP I. Selanjutnya dimasa sekarang dan era PJP II, yang lebih dituntut oleh rakyat (yang tidak bisa terbandung gerakannya) dengan kompleks tuntutan yang semakin meningkat, ialah :

Peranan ABRI yang **melindungi dan membela rakyat kecil** (yang menjadi cikal bakal TNI di masa revolusi dan perang kemerdekaan. **Yaitu peranan menolong** yang lebih besar, dan tidak menakut-nakuti, menekan atau memaksa rakyat miskin dan mereka yang tidak mempunyai, serta belum pernah menikmati hasil dari kemerdekaan.<sup>3</sup>

Sementara itu seperti diketahui, faktor utama terjadinya krisis nasional dewasa ini adalah terlalu besarnya kekuasaan eksekutif ditangan Presiden, baik di masa Orla maupun Orba. Badan legislatif dan yudikatif sangat rapuh terhadap pengaruh eksekutif. Akibatnya, banyak terjadi penyelewengan sehingga tujuan Repelita banyak yang tidak tercapai. Timbul pertanyaan, mengapa Fraksi ABRI dalam legislatif tidak

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan*, (Bandung: Maju Mundur, 1996), hlm. 7.

bersuara, mengoreksi perilaku badan eksekutif agar kembali pada jalan yang lurus? Menurut Sri Muljono Herlambang, berbeda dengan pada masa Orla, sepanjang masa Orba ABRI selalu mendukung pemerintah meskipun tampak jelas banyak tindakan rezim Soeharto yang tidak *populace-oriented*.<sup>4</sup>

Berdasarkan dwifungsi sebenarnya Fraksi ABRI di parlemen boleh tidak setuju bahkan menentang pemerintah bila kebijakan pemerintah merugikan rakyat banyak. Mestinya ABRI mengacu kepada Panglima Besar Jendral Soedirman, ketika pada Mei 1946 secara resmi bersumpah setia di Presiden Soekarno. Soedirman dengan tegas menyatakan , *pertama*, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Negara Indonesia, *kedua*, melaksanakan perintah dari Pemerintah.<sup>5</sup>

Mengapa F-ABRI tidak seperti Soedirman, mengutamakan rakyat yang merupakan unsur terpenting dari Negara? Jawabannya adalah bahwa para anggota F-ABRI di legislatif lebih yunior dari komandan atau panglima satuan wilayah yang menjadi organisasi induknya. Disamping itu, F-ABRI memang mewakili ABRI bukan mewakili rakyat (karena mereka tidak dipilih melalui pemilu, melainkan diangkat). Akibatnya mereka senantiasa tunduk pada pimpinan, sesuai budaya organisasi militer, menjabarkan atau meneruskan arahan atau perintah dari Mabes TNI. Disamping menguasai F-ABRI di legislatif, dan para pejabat eksekutif dan yudikatif dari TNI, Panglima TNI juga menguasai seluruh jajaran militer. Panglima TNI mempunyai kekuasaan atau pengaruh yang sangat besar atau terlalu besar pada

---

<sup>4</sup> Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 59.

<sup>5</sup> Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 60.

kehidupan politik. Di balik itu dia seperti sebuah pedang bermata dua: tergantung pada orientasi kesetiaannya. Ini dapat menguntungkan atau merugikan rakyat banyak. Panglima TNI akan menanggung beban sangat berat bila presiden tidak didukung oleh sebagian besar rakyatnya, misalkan karena KKN.

Memang, sebagaimana diungkapkan seorang narasumber di Bandung, bahwa sistem yang di bangun ABRI melahirkan pola hubungan patron-klien (atasan-bawahan) yang sangat dominan. Peranan pemimpin menjadi sangat dominan. Akibatnya, apa yang diinginkan soeharto dilakukan pula oleh ABRI.<sup>6</sup>

Lebih jauh pada akhirnya, dwifungsi ABRI memang telah membawa akibat yang begitu “mengerikan” sebagaimana dilukiskan dengan sangat impresif oleh Daniel Dhakidae dibawah ini:<sup>7</sup>

Ironi sejarah justru terjadi di sini. Kemenangan total dengan penguasaan secara monolitik membawa kekalahan hampir total bagi bangsa tidak dalam jangka pendek. Akan tetapi dalam jangka panjang-dalam kegagalan ekonomi sosial, dan kebudayaan Orde Baru. Dengan memanfaatkan kemewahan melihat kebelakang, kini terbukti buku jendral Ali Moertopo, *Akselerasi Pembangunan Dua puluh lima tahun*, hanya menjadi parodi. Akselerasi pembangunan lebih menjadi akselerasi kehancuran hampir-hampir menjadi *sein zum tode*, nasib *Heideggerian*. Ketika sistem neofasisme militer merumuskan pembangunan sebagai ideologi, maka diujung pembangunan Orde baru itu adalah kerusakan ekonomi dengan menimbun utang dalam miliaran

---

<sup>6</sup> Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 60.

<sup>7</sup> Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 62.

dolar, dengan daya tawar bangsa terendah dalam sejarah. Dengan cita-cita mempertahankan “kesatuan dan persatuan” *at all cost* dan bukan “Bhineka Tunggal Ika” sebagaimana di rumuskan para pendiri bangsa ini, yang diperoleh adalah disintegrasi nasional dalam tingkatan jauh lebih sistematis dari masa-masa sebelumnya.<sup>8</sup>

Pada awal tahun 1998, telah membuka peluang hadirnya era reformasi. Era yang ditandai dengan terjadinya konfigurasi masyarakat yang semakin bebas dalam mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Keadaan ini telah mendorong masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan Orde baru. Masyarakat memandang banyak kebijakan dan langkah-langkah birokrasi di masa lalu yang mengakibatkan bangsa Indonesia jatuh dalam krisis. Melalui tema dan semangat reformasi nasional, gerakan masyarakat cenderung bebas dan otonom melepaskan diri dari ikatan-ikatan norma dan tatanan yang ada dimasa lalu, dan bergeser mencari format baru.

Bersamaan dengan bergulirnya Reformasi Nasional, dan berkembangnya *euphoria* di tengah-tengah masyarakat, mengalir pula arus kritik dan sorotan terhadap ABRI (sekarang TNI).<sup>9</sup> Berbagai slogan kritik diangkat sebagai topik dalam berbagai kegiatan demonstrasi, seminar dan pemberitaan media massa yang muatannya cenderung memosisikan ABRI yang paling bertanggung jawab atas berbagai bias dan eksek dalam kehidupan nasional di masa lalu.

---

<sup>8</sup>Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 63.

<sup>9</sup>Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 3.



Peran sosial politik ABRI dipandang telah dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat eksistensi rezim Orde Baru. Tugas Kekaryaan yang merupakan salah satu implementasi fungsi Sospol ABRI dinilai telah menimbulkan bias-bias dalam kehidupan nasional. Sementara pelaksanaan fungsi Hankam dipandang tidak menggambarkan tingkat profesionalisme seperti yang diharapkan. Maka timbul desakan agar Dwifungsi ABRI dihapuskan.<sup>10</sup>

Pada saat itu, TNI seakan masuk dalam perangkap *the spiral of silent* nya Elizabeth Nieuman (1980). Apabila berbagai media massa secara bersama dan seragam menampilkan satu cara pandang atas sesuatu topik atau kejadian, maka mereka yang berbeda pandangan atau pandangan minoritas akan meragukan sendiri pandangannya. Arus kritik dan sorotan pada waktu itu seakan memandang dan memposisikan ABRI sebagai yang paling bertanggung jawab atas kesalahan bangsa ini di masa lalu. Pandangan semacam ini bisa saja terjadi karena di samping ABRI memang bagian dari format politik pemerintah di masa lalu, ABRI sebagai salah satu komponen bangsa yang secara institusional tetap solid di tengah-tengah kegamanan dan *euphoria* reformasi pada masa itu. Oleh karena itu keberadaannya seakan diposisikan sebagai simbol masa lalu Orde Baru yang “*masih kokoh tegak*” dan menjadi tumpuan sasaran kritik maupun sorotan. Menghadapi tuntutan perkembangan

---

<sup>10</sup> Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 4.

yang ada, TNI mengambil sikap *aspiratif dan akomodatif* dengan merumuskan paradigma baru perannya dan menata diri dengan melaksanakan reformasi nasional.<sup>11</sup>

Seperti pada Negara-negara berkembang pada umumnya, ada masanya militer harus meninggalkan keterlibatan dalam dunia politik dan kembali ke barak. Proses perubahan sangat *variatif* sesuai latar belakang dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing militer di negerinya (Talukder Maniruzzaman, 1998).<sup>12</sup>

Namun satu hal yang pasti yang harus dicatat, terkait dengan hal diatas hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki atau disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya, bahkan tanpa adanya bentuk atau macam-macam diskriminasi, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji tentang “Penghapusan Hak TNI dalam Keterlibatan Politik menurut UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI Ditinjau dari Perspektif HAM”.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian maka penelitian ini difokuskan melalui kajian pustaka sebagai sumber utama mengenai pembahasan tentang TNI yang bertujuan: untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan hak politik TNI dihapuskan, tanggapan HAM dalam memandang

---

<sup>11</sup>Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*,( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 5.

<sup>12</sup>Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*,( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 5.

penghapusan dunia militer serta apakah mundurnya TNI dari politik merupakan bentuk dari profesionalitas TNI.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penghapusan Hak Politik TNI ?
2. Bagaimana Profesionalitas TNI dalam UU HAM ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penjelasan dari pandangan Undang-undang HAM tentang Faktor faktor penghapusan hak politik TNI.
2. Untuk mengetahui profesionalitas TNI yang sesungguhnya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan laporan skripsi ini di kemukakan beberapa manfaat yaitu:

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis.
2. Untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa tentang peran TNI yang sesungguhnya.
3. Untuk menjelaskan kepada seluruh mahasiswa bahwa penghapusan hak TNI dalam keterlibatan politik merupakan suatu profesionalitas militer di era modernis.

4. Untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI bukanlah suatu peraturan yang mengandung unsur diskriminasi melainkan bentuk dari konsekuensi demokrasi yang sesungguhnya.

## **F. Kerang Pemikiran**

Pada awalnya keberadaan pemerintahan militer memang dipandang penting bagi kelangsungan pemerintah negara tersebut. Dalam konteks ini beberapa ilmuwan memandang militer sebagai kekuatan sangat modern, yang mengalihkan keterampilan organisasi tehnik yang mereka miliki ke dalam bidang pemerintahan dan administratif. Dengan kata lain, hanya militer lah yang dianggap mampu menjaga kelestarian ideologi nasional, sementara kaum elit politik sipil pasti tidak akan mampu melakukannya. Memang, ada pula yang berpandangan bahwa sejak Orba berkuasa, ketika ABRI memainkan peran penting melalui dwifungsi, penyelenggaraan kekuasaan justru mencatat prestasi-prestasi penting. Prestasi itu ialah terciptanya kestabilan politik dan lancarnya pembangunan ekonomi, dua faktor terpenting untuk mengukur keberhasilan sebuah negara mengembangkan diri.<sup>13</sup>

Namun dalam perkembangannya, lamanya militer memegang tampuk pemerintahan dalam suatu negara, berdampak pada munculnya kecenderungan peran militer yang semakin menguat menguasai berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah bagi tatanan demokrasi serta hubungan sipil dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 26.

militer maka muncul upaya-upaya untuk menarik dan menempatkan kembali secara tepat peran militer dalam kehidupan negara demokrasi atau *military withdrawal from politics* yang dalam konteks Indonesia adalah Reformasi TNI.

Para pengamat pada akhirnya mengakui bahwa bagaimana pun manajemen militer tidak mungkin dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada dalam suatu negara, terutama dalam mengelola permasalahan politik ataupun sebagai kekuatan politik. Edward Fiet memberi contoh, beberapa pemimpin militer seperti Ayub Khan di Pakistan (1958-69), Ne Win di Burma (1962-1988), Gamal Abdul Nasser di Mesir (1952-1970), dan Primo De Rivera (1923-1931) di Spanyol, yang kesemuanya memiliki periode memerintah yang cukup panjang, tidak berhasil membangun lembaga-lembaga politik yang tahan lama (Fiet, 1973:255-73). Heruwirz mengangkat contoh kegagalan tentara Mesir. Menurutnya kegagalan total tentara Mesir pada umumnya juga disebabkan oleh perluasan peran politik Angkatan Bersenjata Negeri itu. Sebagian karena penempatan perwira yang tidak handal di luar kekuatan pertahanan, dan sebagian lagi dipakai untuk memberikan ganjaran pekerjaan yang menguntungkan bagi para pengikut setia.

Gamal Abdul Nasser telah mengalihkan sekitar 300 orang perwira senior angkatan bersenjata ke dalam jabatan-jabatan sipil (Hurewitz, 1966:134). Sementara Khan berpendapat tentang pengamatannya terhadap tentara Pakistan. Menurutnya, meskipun tentara Pakistan dilahirkan dari tentara yang profesional, kualitas tentara dengan cepat merosot karenan “keterlibatannya dalam menciptakan dan meruntuhkan rezim”.

Ini adalah penyaluran keterampilan dan pengalaman yang luar biasa. Sejumlah besar perwira mengambil alih peran politik dan *administratif*. Sebagian lain dipaksa untuk pension karena alasan-alasan politik (Khan, 1973:255-69). Pengalaman dari beberapa negara berkembang menunjukkan adanya variasi waktu dalam proses mundurnya militer dalam keterlibatannya di bidang politik dalam suatu negara.<sup>14</sup>

Dalam menyikapi semua permasalahan nasional tersebut, prajurit TNI tidak punya alternatif lain kecuali mereformasi paradigma lama dan menyelaraskan dengan tuntutan reformasi itu sendiri serta selalu menjaga dan mempertahankan jati diri prajurit sebagai Bhayangkari negara yang selalu siap sedia berkorban dan meningkatkan profesionalitasnya demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia.<sup>15</sup>

Secara ideal tuntutan kualitas profesionalisme TNI akan ditampilkan oleh etos kerja individu-individu TNI yang menggambarkan TNI yang cerdas, tangkas, berbudi pekerti luhur yang mencirikan perpaduan iptek dan imtaq. Etos kerja ini merupakan *resultante* dari aspek-aspek fisik, kepribadian dan perilaku anggota TNI yang bersangkutan. Disamping etos kerja kesatuan-kesatuan TNI hendaknya menggambarkan satuan yang utuh (*solid*) untuk kebanggaan Korps yang kuat serta kemampuan bertindak yang tepat pada berbagai situasi yang dihadapi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 27.

<sup>15</sup> Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS, *TNI Harus Kembali Pada Jati Dirinya*, dalam "Majalah SENA", No. 11-12 tahun IX, 30 November-Desember 1999, hlm. 40.

<sup>16</sup> Syahrin Harahap Dkk, *Islam dan Reformasi TNI*, ( Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 79.

Disamping itu para anggota TNI sendiri harus benar-benar menghayati demokratisasi sebagai *way of life* atau cara hidup. Tanpa penghayatan seperti itu maka usaha untuk menegakan demokrasi akan menjadi palsu, seperti patung tanpa nyawa. Dimana-mana, termasuk di negara kita, sering eksperimen demokrasi dan perjuangannya terhalang oleh mereka yang mengaku “demokratis” namun tidak menunjukkan sikap pribadi yang demokrasi, karena gagal meyakini dan mempraktekan demokrasi sebagai *way of life* misalnya adalah suatu ironi, bahkan *contradiction interminus*, bahwa seseorang, atas nama demokrasi, memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Jelas sekali hal itu terjadi karena dominannya unsur *versted interest* orang atau kelompok bersangkutan. Untuk mewujudkan kemampuan profesionalisme tersebut dibutuhkan peningkatan kemampuan penguasaan materi ketatanegaraan, penguasaan keterampilan, penggunaan peralatan khusus (teknologi) melengkapi pelaksanaan lapangan dengan peralatan yang memadai, penambahan jumlah personil dan anggaran operasional setidaknya mencapai kebutuhan minimal, pendidikan dan pelatihan yang relevan sehingga melahirkan keuletan yang berimplikasi kepada nilai tidak kenal menyerah, kejujuran dan keikhlasan dalam berbagai pengabdian, serta menampilkan keberanian untuk mencegah yang munkar dan menegakan kebenaran.<sup>17</sup>

Sorotan masyarakat terhadap ABRI sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum datangnya gelombang reformasi. Keruntuhan Soeharto mendorong dan

---

<sup>17</sup> Syahrin Harahap Dkk, *Islam dan Reformasi TNI*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 79.

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan secara lebih keras kesalahan-kesalahan ABRI di masa lalu. Gugatan yang datang begitu gencar tak lain karena banyaknya luka lama yang belum disembuhkan. Belum pernah dalam sejarah ABRI dikritik sebegitu rupa. Itu dapat kita amati terutama antara lain dari berita-berita yang muncul di media massa dalam bulan-bulan pertama sesudah Soeharto lengser. Setiap hari senantiasa ada saja sajian berita-berita bernada miring ihwal ABRI. Daftar panjang kesalahan ABRI semakin meyakinkan sipil bahwa dwifungsi ABRI harus ditinjau kembali karena telah mengalami distorsi yang terlalu banyak.<sup>18</sup>

Tuntutan terhadap perlunya reposisi ABRI bukan hanya menyangkut pelanggaran-pelanggaran HAM sebagai eksekutif negatif dari operasi tugas mereka, melainkan lebih jauh berkait erat dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern terutama menyangkut pembagian kerja *division of labour* sesuai dengan bidang masing-masing. Figur-figur dari kalangan ABRI memiliki spesifikasi di bidang hankam, namun dalam praktik selama Orde Baru mereka dapat memasuki jabatan-jabatan strategis tertentu yang bukan bidangnya. Sudah tentu pola semacam ini membawa dampak yang sangat merugikan, sebab figur-figur ABRI itu jelas tidak menguasai bidang nonhankam, jauh dibawah kualitas para profesional sipil.

Kecuali itu, anggota-anggota ABRI dalam kedudukan non organik ABRI lebih sering merusak citra ABRI sendiri lantaran acap terjebak dalam tindak-tanduk otoritarianisme dalam penyalahgunaan wewenang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 111.

<sup>19</sup> Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *Tentara Yang Gelisah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 112.



Dalam konteks sosiologi, proses penempatan pada posisi yang tepat dalam masyarakat merupakan proses yang juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan tersendiri baik internal maupun eksternal. George Ritzer-Douglas J. Goodman, menggambarkan bahwa penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat menjadi masalah karena tiga alasan mendasar. *Pertama*, posisi tertentu lebih menyenangkan untuk diduduki ketimbang posisi yang lain. *Kedua*, posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat ketimbang posisi yang lain. *Ketiga*, posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda pula. (George Ritzer, 2003-119).<sup>20</sup>

Dalam konteks alasan pertama, perubahan internal TNI memosisikan TNI harus merelakan berbagai posisi (yang mengemuka dan dinikmatinya) di masa lalu untuk ditinggalkan. Dalam konteks alasan kedua, posisi-posisi tertentu harus ditinggalkan untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan peran dan fungsi komponen bangsa lainnya juga yang terikat dalam membangun sistem demokrasi. Dalam konteks alasan ketiga, perubahan TNI menuntut adanya kemampuan psikis dan profesi bagi prajurit TNI untuk menyesuaikan diri dengan posisi-posisi peran barunya. Semua tuntutan tersebut menggambarkan adanya proses refungsionalisasi peran TNI akibat perannya di masa lalu yang di nilai mengalami disfungsi, malfungsi ataupun multifungsi. Pada hakikatnya refungsionalisasi dengan paradigma baru TNI

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 34.

merupakan penegasan TNI telah meninggalkan aspek disfungsinya atau mengakhiri dwifungsi.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan metode "*Library Research*" yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penghapusan hak TNI dalam berpolitik ditinjau dari perspektif HAM.

### **2. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan study pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah penghapusan hak TNI dalam berpolitik yang ditinjau dari perspektif HAM.

### **3. Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, selanjutnya data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani Basuki, *Reformasi TNI Pola, Profesionalisasi dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat*, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), hlm. 35.

#### 4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulis Karya Tulis Ilmiah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku Hasil penelitian YIPIKA tentang posisi ABRI dalam gerakan reformasi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran mengenai skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan terbagi dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang merupakan Gambaran Umum, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Berisikan tentang TNI : Dinamika Sosio Historis di Indonesia, yang meliputi: Sejarah lahirnya militer di Indonesia dan Metamorfosa Dwifungsi ABRI.

Bab III: Berisikan tentang Relevansi Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang, yang meliputi Hak Asasi Manusia dalam tinjauan sejarah, Ruang lingkup Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang.

Bab IV: Pada bab ini merupakan inti pembahasan yaitu Penghapusan Hak TNI dalam Keterlibatan Politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Ditinjau dari Perspektif HAM yang meliputi Penghapusan Peran TNI

menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI, serta Profesionalitas TNI dalam Undang-undang HAM.

Bab V: Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran